

**EFEKTIVITAS TIM INTI PERANCANAAN  
PARTISIPATIF (TIPP) DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN (RPLP) DI KAMPUNG MUKTI  
MAKMUR KOTA SUBULUSSALAM**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**ROFIK INDRA LESMANA**  
**NPM. 1403100044**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

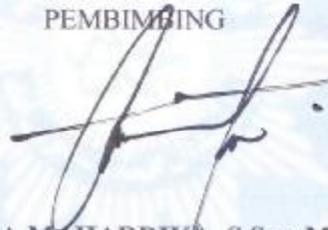
*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : ROFIK INDRA LESMANA  
NPM : 1403100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS TIM INTI PERENCANAAN PARTISIPATIF (TIPP) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) DI KANTOR KEPALA KAMPUNG MUKTI MAKMUR KOTA SUBULUSSALAM

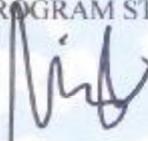
Medan, Maret 2018

PEMBIMBING



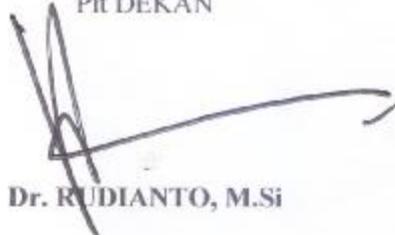
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**NALIL KHARIAH, S.IP, M.Pd**

Plt DEKAN



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : ROFIK INDRA LESMANA

NPM : 1403100044

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.

PENGUJI II : Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si

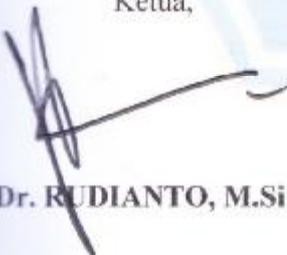
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP



(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua,



Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Rofik Indra Lesmana, NPM. 1403100044, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menciptakan dan mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciptaan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan,

Rofik Indra Lesmana





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : **ROFIK INDRA LESMANA**  
NPM : **1403100044**  
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS TIM INTI PERENCANAAN PARTISIPATIF (TIPP) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) DI KAMPUNG MULTIMAKMUR KOTA SUBULUSSALAM**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22-jan-2018	Perbaiki Pedoman Wawancara	f.
2.	22-feb-2018	Perbaiki Hasil Wawancara.	f.
3.	24-feb-2018	Perbaiki Penulisan dan tanda baca	f.
4.	07-Maret-2018	Tambah Hasil Wawancara Per kategorisasi	f.
5.	08-Maret-2018	Sesuaikan Hasil Wawancara dengan kategorisasi	f.
6.	10-Maret-2018	Tambahkan kesimpulan hasil wawancara seluruh kategorisasi	f.
7.	12/Maret/2018	Sesuaikan Pembahasan dengan hasil wawancara, tambahkan teori di Pembahasan	f. f.
8.	14/Maret/2018	Perbaiki kesimpulan dan saran.	f.
9.	19/Maret/2018	Acc Skripsi	f.

Medan, ..... **MARET** ..... 2018....

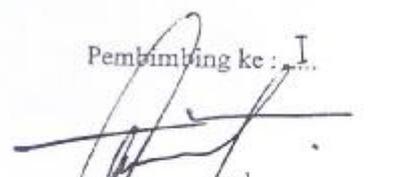
Dekan,

  
Dr. PUJIYANTO, M.Si.)

Ketua Program Studi,

  
(NALIK KHAIRIAH, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : I.

  
ANANDA MARDIANA, S.Sos, M.Sp

**EFEKTIVITAS TIM INTI PERENCANAAN PARTISIPATIF (TIPP)  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN (RPLP) DIKAMPUNG MUKTI MAKMUR KOTA  
SUBULUSSALAM**

**ROFIK INDRA LESMANA**

**1403100044**

**ABSTRAK**

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) merupakan tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahan/Desa yang terdiri dari unsur - unsur yang ada dalam masyarakat seperti kepala desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), relawan/kelompok yang peduli dengan pembangunan yang ada didesanya dan tenaga pendamping yaitu tim fasilitator dari program kotaku. TIPP berfungsi menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan di tingkat desa. Dalam pelaksanaan penyusunan RPLP sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak – pihak terkait, sehingga akan menghasilkan perencanaan penataan lingkungan permukiman yang efektif. Namun, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat serta komunikasi yang tidak baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat menyebabkan tidak adanya integrasi dan adaptasi yang baik antara TIPP dan pihak-terkait dengan masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul Efektifitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dikampung Mukti Makmur Kota Subulussalam. Dengan tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dikampung Mukti Makmur Kota Subulussalam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan menyajikan data-data yang telah didapat berupa dokumen - dokumen, arsip dan juga referensi lainnya yang diperoleh langsung dari desa tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui RPLP belum maksimal; (2) kemudian integrasi dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat penyusunan RPLP, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP; (3) sedangkan adaptasi dalam hal ini yaitu tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat. Oleh sebab itu Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di Kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam belum dapat dikatakan efektif.

**kata Kunci:** *Efektivitas TIPP, Penyusunan RPLP*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr, Wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa pula shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa ummat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul “ Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di kampung Mukti Makmur kota Subulussalam” dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana Sosial pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga penulis yang teristimewah dan tersayang, khususnya kepada Ibunda penulis Suti’ah dan Ayahanda Sujiono serta kepada abangda Roin Adi Candra dan adinda Siska Sekar Dewi Larassati yang selalu memberikan kasih sayang, do’a dan dukungan dari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu

memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan dan membalas semua kebaikan Ibunda, Ayanda, abang dan Adik saya tercinta. Amin

Penulis juga ingi menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah mebantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agusasni, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Rudianto, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Nalil Khiariah, S.IP, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ananda Mahardiaka S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga menjadi dosen pembibing saya, yang telah memberikan arahan dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi
5. Dosen – dosen dan seluruh Staf Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian di kampung Mukti Makmur

7. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini, yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman satu kontrakan Vanzoel, Mas Ndy, Cimeng, Bambang, Rizanatara, dan Suwito yang selalu memeberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman Terspesial saya Kartika Handayani Baizuri Nas0ution yang telah memotivasi saya serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada sahabat group NunCu Irfan Efendi, Adrian Dirga Putra Zebua, Asri Fahrizal, Dian Juwita, Riska Amelia, Moica Chindy Widya, Tasya Anggraini, Karminem, Devi Andriani, Musria,dan Lia Lestari yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada sahabat Dang Adrian Dirga Putra Zebua, Nico Andrian, dan Riski Kurniawan Siregar yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman stambuk 2014 dan seperjuangan yang telah memberi warna dalam perkuliahan.
13. Kepada teman-teman kelas A-pembangunan sore yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 2018

Penulis

**Rofik Indra Lesmana**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Efektivitas .....	9
B. Ukuran efektivitas .....	10
C. Konsep Tim Inti Perencanaan Partisipatif.....	12
1. Pengertian Perencanaan Partisipatif .....	12
2. Manfaat Perencanaan Partisipatif.....	13
3. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Partisipatif .....	14
4. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) .....	15
5. Tugas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).....	15
D. Konsep Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman .....	16
1. pengertian Penyusunan.....	16
2. Pengertian Rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) .....	16
3. Tujuan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Kerangka Konsep.....	22
C. Defenisi Konsep.....	23
D. Kategorisasi .....	24
E. Narasumber.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data .....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian.....	28

1. Gambaran Umum Kondisi Kampung Mukti Makmur .....	28
2. Visi dan Misi Kampung Mukti Makmur .....	31
3. Struktur Pemerintahan Kampung .....	36
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Wawancara.....	48
B. Pembahasan .....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Tiap Dusun.....	30
Tabel 3.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	30
Tabel 3.3 Menurut Tingkat Pendidikan .....	31
Tabel 3.4 Daftar Perangkat Kampong Kampong Mukti Makmur.....	37
Tabel 3.5 Daftar anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Kampong Mukti Makmur .....	37
Tabel 3.6 Rekap Struktur Pemerintahan Kampong Mukti Makmur .....	38
Tabel 3.7 Rekap Struktur Pemerintahan Kampong Mukti Makmur Lanjutan..	38

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 kerangka Konsep .....	22
Gambar 3.2 Bagan Pemerintahan Kampong Mukti Makmur .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VIII: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian di Kampung Mukti Makmur

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Guna mendukung pemenuhan target RPJMN 2014-2019 itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membidik permukiman kumuh.

Perencanaan dalam arti sederhana adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi seperti itu sebetulnya tidak salah, tetapi tidak mampu memberikan penjelasan atas suatu perencanaan yang rumit dan luas. Definisi seperti itu cocok

untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan mudah dan tidak terdapat faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan dalam arti luas adalah menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Moekijat dalam Robinson Tarigan, M.R.P. (2003) menyebutkan bahwa ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar perumusan ini di kutip dari berbagai buku teks manajemen. Empat di antaranya dikutip dari ini (moekijat,1980:431-432): (1)Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di usulkan, yang di anggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan; (2)Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang di lakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan; (3) Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan. (4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan - tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus di capai.

Rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. RPLP berisi peta kondisi eksisting atau rona awal, peta topografi dan peta rencana peruntukan lahan lima tahun ke depan, analisis perkara-perkara kritis kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturan-aturan dan kesepakatan - kesepakatan tentang pembangunan kawasan. RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.

Dalam penyusunan RPLP tidak boleh bertentangan dengan produk perencanaan yang ada diwilayah kelurahan maupun Kota. Dengan kata lain RPLP harus mengacu pada RT/RW, RPJM Daerah, dan Dokumen Perencanaan Permukiman. Dalam sistem Perencanaan, semua perencanaan di semua level harus sinkron.

Adapun tim yang menyusun RPLP adalah merupakan tim khusus yaitu Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang berfungsi menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang di bantu oleh kepala kampung/desa, dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). TIPP pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan/desa beserta stafnya, BKM/LKM dan kelompok peduli setempat mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan/desa dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program penyusunan Rencana Penataan Lingkungan

Permukiman (RPLP). TIPP menjalankan fungsi dan perannya selama pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BKM/LKM bersama Lurah/Kepala Desa dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang TIPP apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program PLPBK di kelurahan/desanya. Dalam hal ini masyarakat juga terlibat dalam penyusunan RPLP tersebut yang di wakili oleh kelompok peduli dan relawan yang peduli akan pembangunan desa.

Di kota subulussalam khususnya di kampung Mukti Makmur dalam penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman TIPP berkoordinasi dengan BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa, tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan PLPBK. Bekerjasama dengan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang akan memberikan pendampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan. Didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, aturan bersama secara partisipatif dan penyusunan strategi dengan melibatkan masyarakat. Mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil - hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya TIPP sebagai penyusun RPLP yang di mulai dari sosialisasi dan perencanaan hingga pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang hendak direalisasikan. TIPP sangat berperan penting dalam proses

perencanaan pembangunan desa yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas. TIPP yang berkoordinasi dengan BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa, tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Bekerjasama dengan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang akan memberikan pendampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan. Dalam melakukan penyusunan RPLP di perlukan adanya koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan RPLP. Dengan adanya koordinasi yang baik di harapkan semua pihak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas TIPP dalam melakukan penyusunan RPLP dapat dilihat dari adanya pelaksanaan fungsi yang optimal pada masing-masing pihak. Pelaksanaan fungsi yang optimal dalam suatu proses penyusunan perencanaan pada prinsipnya di laksanakan dengan kerjasama secara kooperatif yang dilakukan oleh TIPP dengan pihak-pihak terkait. Namun demikian di kampung Mukti Makmur kota Subulussalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) belum terlaksana dengan dengan semestinya. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai baik di kalangan masyarakat, relawan, dan pada perangkat desa yang juga berperan guna membantu TIPP dalam penyusunan RPLP, kurangnya sosialisasikepada masyarakat mengenai RPLP tersebut, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta tidak adanya Pemetaan Sosial dan Pemasyarakatan Pemetaan swadaya(PS) sehingga membuat RPLP yang dihasilkan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Di Kantor Kepala Kampung Mukti-Makmur Kota Subulussalam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan di teliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Di Kantor Kepala Kampung Mukti-Makmur Kota Subulussalam”**.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: **“Untuk mengetahui Bagaimanakah Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan**

Permukiman (RPLP) Di Kantor Kepala Kampung Mukti-Makmur Kota Subulussalam”.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diungkapkan secara spesifik sebagai berikut:

- a. Secara Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai penyusunan RPLP yang efektif.
- b. Secara Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian
- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya,serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

## **D. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Efektifitas, perencanaan partisipatif, TIPP, dan RPLP.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kategorisasi, kerangka konsep, teknik pengumpulan data,tektik penentuan nara sumben,dan lokasi penelitian.

**BAB IV : Hasil Penelitisan dan pembahasan**

Pada Bab ini mengurakan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narumber-narasumber.

**BAB V : Penutup**

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasildari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Efektivitas**

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Menurut Steers (1997) dalam Sutrisno (2007:123) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia harusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha meningkatkan efektivitas seharusnya selalu di mulai dengan meneliti perilaku manusia di lingkungan kerja.

Menurut William Dunn (2000:498) dalam Prihatmanti 2013(jurnal) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberi hasil/akibat yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Siagian (2002:20), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu pada waktunya. Selanjutnya di kemukakan bahwa efektivitas sebagai orientasi kerja

menyoroti empat hal yaitu: (a) sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi; (b) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus ditentukan sudah dihasilkan; (c) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; (d) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Menurut Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Pendapat Mahmudi tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas terfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah hasil dari hubungan yang berbanding terbalik antara *outcome* dengan *output*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat di capai dengan hasil yang memuaskan.

## **B. Ukuran Efektivitas**

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan seperti yang kemukakan Julia dalam Prihatmanti (2013:2). Berdasarkan beberapa

pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Untuk itu, untuk menentukan suatu program dinyatakan efektif atau tidaknya perlu adanya kriteria atau ukuran-ukuran efektivitas.

Menurut Steers dalam Prihatmanti (2013:2) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu (1) Produktivitas, (2) Kemampuan adaptasi kerja, (3) Kepuasan kerja, (4) Kemampuan berlabar, dan (5) Pencarian sumber daya. Ukuran efektivitas yang dikemukakan Steers dapat dipahami bahwa suatu program atau kegiatan dapat diketahui keberhasilannya tidak hanya dari upaya pencapaian tujuannya semata, tetapi juga kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dari pendapat yang diungkapkan oleh Steers diketahui bahwa ukuran efektivitas dilihat dari segi finansial dan suasana dalam pekerjaan. Ada pula ukuran efektivitas yang dijelaskan oleh Steers(1985: 53): (1) Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu, dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target kongkrit; (2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi; dan (3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### **C. Konsep Tim Inti Perencanaan Partisipatif**

#### **1. Pengertian Perencanaan Partisipatif**

Menurut Gonzalez dalam Winny dan Ayu (2009:149) menyebutkan bahwa konsep perencanaan partisipatif dapat diilustrasikan dalam bentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Pelibatan masyarakat dapat dinyatakan sebagai proses dimana perhatian, kebutuhan, nilai-nilai, harapan-harapan dan persoalan-persoalan dari masyarakat diperhitungkan oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dinyatakan dengan adanya hubungan timbal balik/dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dimana dalam hubungan ini terdapat pembagian peran dan tanggung jawab dalam pembangunan.

Pemikiran mengenai manfaat dan tujuan partisipasi masyarakat, pada umumnya dikaitkan dengan kinerja dari proyek pembangunan, yaitu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat lebih mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya.

Pendekatan perencanaan partisipatif merupakan koreksi atas model pembangunan sebelumnya yang bersifat top-down. Dalam pendekatan top-down keputusan ditentukan oleh pemerintah, penyandang dana dan para ahli

(perencana). Dengan pendekatan perencanaan partisipatif, masyarakat sebagai pemanfaat pembangunan didorong untuk terlibat dalam intervensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Dalam model pembangunan sebelumnya mereka tidak mempunyai pengaruh dan kendali atas intervensi tersebut. Mereka ini terutama adalah kelompok yang secara ekonomi dan sosial termarginalkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Perencanaan partisipatif dalam kegiatan penyusunan RPLP merupakan bagian dari kegiatan yang fokus pada proses penyusunan rencana pengembangan lingkungan permukiman Desa/Kelurahan, dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat (BKM dan UP-UP nya), Pokja-pokja , Perangkat Kelurahan/Desa, Tim Teknis Pemda untuk penyusunan , Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), yang didukung oleh, Tim Konsultan Pendamping (Korkot/Korkab,) Kelompok pemerhati dan pemangku kepentingan lainnya.

Perencanaan Partisipatif dalam kegiatan penyusunan RPLP merupakan serangkaian kegiatan yang bertumpu kepada kegiatan sosialisasi dan penggalian visi kawasan, pemetaan potensi dan masalah, perumusan tata lingkungan permukiman, serta perumusan rencana tindak bersama masyarakat.

## **2. Manfaat Perencanaan Partisipatif**

- a) Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil pembangunan.
- b) Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan.

- c) Efisiensi dan efektivitas, karena keputusan diambil sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun sumber daya di masyarakat.
- d) Memberdayakan masyarakat setempat, terutama membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerjasama.

### **3. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Partisipatif**

Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SD yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan. Membangun sinergi positif dan konsolidasi resources yang ada di masyarakat dan terutama di lingkungan permukiman setempat, dalam rangka membangun kesadaran, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hunian dan kehidupan yang lebih baik.

Sasaran yang ingin dituju yaitu: (1) Termotivasinya masyarakat kampung Mukti Makmur untuk mewujudkan peningkatan kualitas hunian dan kehidupan yang lebih baik. (2) Terbangun & terdefinisikannya kesepakatan bersama masyarakat (yang disepakati pula oleh pemerintah daerah) tentang tatanan masyarakat setempat di kemudian hari, yang secara umum dituangkan dalam Visi kawasan. (3) Teridentifikasi potensial resources (fisik, sosial maupun ekonomi) yang dimiliki oleh masyarakat dan atau lingkungan permukiman Kampung Mukti Makmur, yang akan menjadi modal dasar dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang di idamkan. (4) Terdefinisi dan terencananya tatanan lingkungan permukiman yang diharapkan beserta strategy

dan pentahapan pencapaiannya. (5) Penguatan tali mandat BKM sebagai pusat pelayanan masyarakat terutama dalam kaitan pengelolaan perencanaan pembangunan.

#### **4. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)**

Tim inti perencanaan partisipatif adalah tim kerja yang dibentuk untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif dan bertugas melaksanakan setiap tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, sesuai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan program RPLP. Anggota dari TIPP adalah unsur-unsur berikut. Lurah/kepala kampung, BKM/LKM, Relawan/Kelompok peduli, Tenaga Pendamping Perencanaan, Pokja – Pokja yang terdiri dari relawan-relawan.

#### **5. Tugas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)**

Tugas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) adalah :

- a. Mengkoordinasikan data Baseline dengan masing – masing RW.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Lurah, Tim Fasilitator, PK, BKM, RW, dan RT dalam setiap kegiatan.
- c. Menyusun Perencanaan Pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan pertanggungjawaban kegiatan berkerjasama dengan BKM.
- d. Menyusun data RPLP bersama masyarakat.
- e. Mengkoordinasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil – hasil tahapan siklus kepada seluruh masyarakat.

- f. Berkerjasama dengan Tim Fasilitator yang memberikan pendampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan pembangunan.

#### **D. Konsep Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman**

##### **1) pengertian Penyusunan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut : “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”. Dari pengertian diatas dapat simpukan bahwa penyusunan adalah kegiatan dalam memproses data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur.

##### **2) Pengertian Rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP)**

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah produk perencanaan level terbawah, paling dekat dengan masyarakat karena dibuat secara partisipatif oleh masyarakat kelurahan. RPLP adalah salah satu produk perencanaan yang tidak boleh bertentangan dengan produk perencanaan yang ada diwilayah kelurahan maupun Kota. Dengan kata lain RPLP harus mengacu pada RTRW, RPJM Daerah, dan Dokumen Perencanaan Permukiman. Dalam sistem Perencanaan, semua perencanaan di semua level harus sinkron. (Dokumen Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiapan masyarakat terhadap bencana. RPLP berupa dokumen rencana tata ruang yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000 atau 1:5.000 darisuatu kelurahan/desa. RPLP berisi peta kondisi eksisting atau rona awal, peta topografi dan peta rencana peruntukan lahan lima tahun ke depan, analisis perkara-perkara kritis kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan tentang pembangunan kawasan. RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.(Dokumen Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) merupakan produk perencanaan pembangunan tata ruang tingkat kelurahan/desa yang paling dekat dengan masyarakat, yang di buat untuk kurun waktu 5 tahun dengan mengedepankan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka. RPLP berisi tentang peta rencana atau rona awal yang di peruntukan 5 tahun kedepan, selain itu RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan

pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa. Dan dalam penyusunannya RPLP tidak boleh bertentangan dengan produk perencanaan yang ada di wilayah dan pusat, yaitu RPJMD dan RPJMN. (Dokumen Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

### **3) Tujuan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)**

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) merupakan langkah awal dari Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan PLPBK, secara umum disebutkan tujuan dari PLPBK adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. Dengan tujuan khusus yang akan diwujudkan, yaitu: (a) Masyarakat yang sadara pentingnya tinggal di permukiman yang tertata selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana. (b) Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan (c) Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka. (d) Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance). (Dokumen Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Sebagai tahap awal (pertama) dari program PLPBK di Kampung Mukti Makmur, yaitu tahap Perencanaan, pada tahap ini akan dihasilkan sebuah dokumen yang bernama Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Dengan demikian dokumen RPLP Kampung Mukti Makmur ini merupakan salah satu dari hasil proses perencanaan yang dilakukan oleh TIPP, BKM/LSM, warga Kampung Mukti Makmur sendiri. Masyarakat menjadi lebih mengenal potensi dan permasalahan yang dimiliki wilayahnya sehingga mereka dapat menyampaikan gagasan-gagasan untuk pengembangan lingkungan permukimannya.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kampung Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ini adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang hidup secara harmonis dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras, dan lestari dengan menjunjung nilai-nilai budaya lokal.

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah: (1) Terwujudnya masyarakat Kampung Mukti Makmur yang makmur sejahtera lahir dan batin. (2) Terwujudnya masyarakat Kampung Mukti Makmur yang sadar tentang pentingnya permukiman yang sehat, tertata, selaras, dan tanggap bencana. (3) Terwujudnya masyarakat Kampung Mukti Makmur yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan. (4) Terwujudnya masyarakat Kampung Mukti Makmur yang kreatif dan inovatif dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman. (5) Terwujudnya tata kelembagaan

Kampung Mukti Makmuryang efektif dan efisien dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

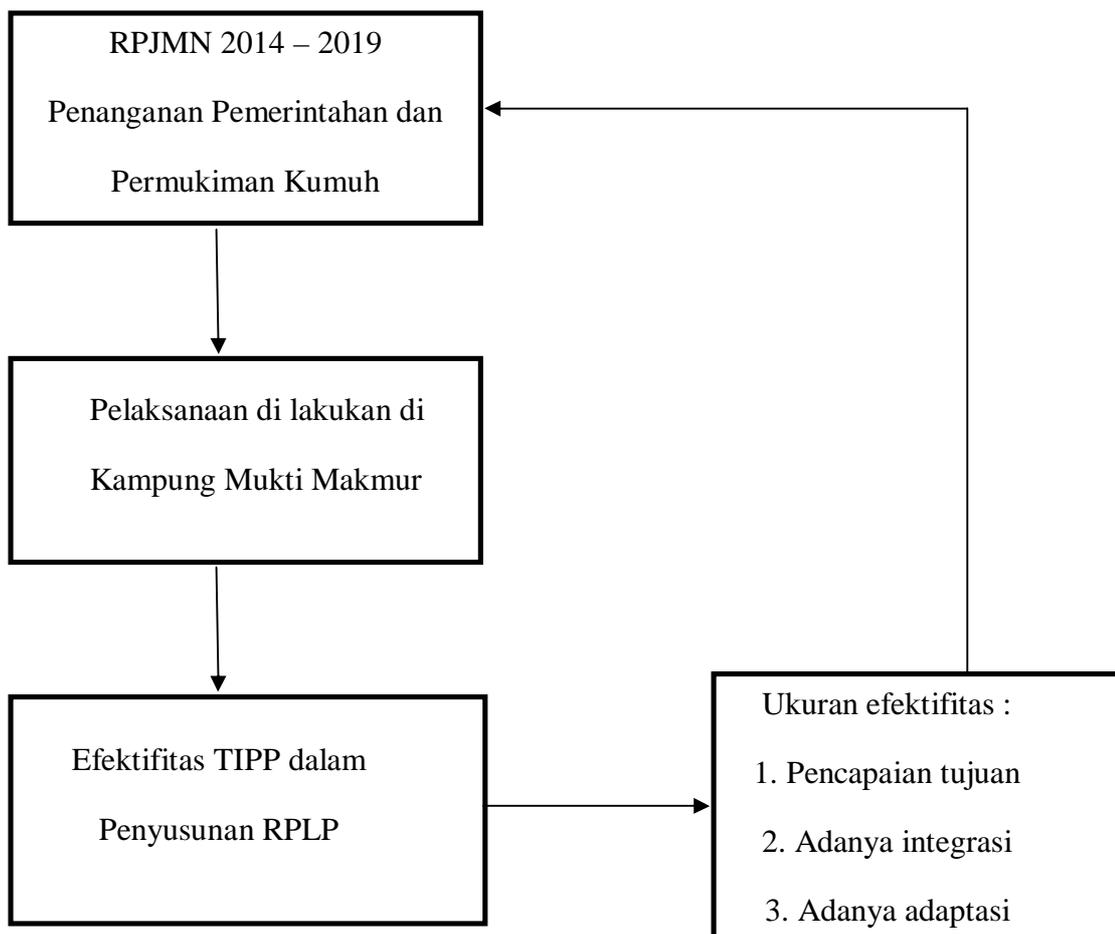
Menurut Moleong (2012:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individusecara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

## B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2009:66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1 kerangka Konsep**



### **C. Definisi Konsep**

Konsep adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian / peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menggaburkan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep penelitian ini dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
- b. Pendekatan perencanaan partisipatif merupakan koreksi atas model pembangunan sebelumnya yang bersifat top-down. Dalam pendekatan top-down keputusan ditentukan oleh pemerintah, penyandang dana dan para ahli (perencana). Dengan pendekatan perencanaan partisipatif, masyarakat sebagai pemanfaat pembangunan didorong untuk terlibat dalam intervensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Dalam model pembangunan sebelumnya mereka tidak mempunyai pengaruh dan kendali atas intervensi tersebut. Mereka ini terutama adalah

kelompok yang secara ekonomi dan sosial termarginalkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kehidupannya.

- c. Tim inti perencanaan partisipatif adalah tim kerja yang dibentuk untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif dan bertugas melaksanakan setiap tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, sesuai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan program PLP BK.
- d. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) merupakan produk perencanaan pembangunan tata ruang tingkat kelurahan/desa yang paling dekat dengan masyarakat, yang di buat untuk kurun waktu 5 tahun dengan mengedepankan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk mendukung analisa variabel.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu TIPP dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan RPLP menjalankan tahap-tahap untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tercapainya tujuan dalam menyusun RPLP yang efektif dan tepat sasaran yang di lakukan oleh TIPP dapat di lihat dari : Terlaksananya

tugas dan fungsi TIPP dalam penyusunan RPLP kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam sesuai dengan waktu yang di tentukan.

b. Integrasi

Integrasi yaitu aspek penyeragaman dan penyatuan dalam suatu sistem. Integrasi dalam hal ini adalah TIPP dan pihak-pihak terkait melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam penyusunan RPLP. Agar penyusunan RPLP dapat terintegrasi dengan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai RPLP, meningkatkan komunikasi antar pihak-pihak terkait, dan melakukan pelatihan kepada TIPP.

c. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan individu/organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini yaitu peningkatan koordinasi dan komunikasi antara TIPP dengan pihak-pihak terkait lainnya.

## **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu dan mengetahui informasi yakni tentang efektivitas tim inti perencanaan partisipatif dalam penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman di kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam.

Untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan

tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah.

- a. Tim Koordinator Kota Subulussalam
- b. Bapak Gunawan (Kepala Desa Kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam)
- c. Ibu Dedeh Kurnia S.Pd. (KetuaBadan Keswadayaan Masyarakat Kampung Mukti Makmur)
- d. Bang Teguh Widodo (Tokoh Pemuda)

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan taknik pengumpulan data sebagai berikut.

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian,
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang di lakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di intyepretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut moleong (2003:1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam roses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir. Yaitu:

1. Reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan

penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

## **H. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di Kampung Mukti Makmur.

## **I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Kondisi Kampung Mukti Makmur**

Kampung Mukti Makmur memiliki luas wilayah yang besar, serta daerah administratif Kampung Mukti Makmur jika dibandingkan dengan Kampung lainnya yang terdapat di Kecamatan Simpang Kiri adalah salah satu Kampung yang memiliki wilayah administratif yang cukup Luas. Namun demikian, dengan Luasnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Kampung Mukti Makmur maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Kampung Mukti Makmur pada masa ke masa.

Secara geografis Kampung Mukti Makmur merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Simpang Kiri yang mempunyai luas wilayah mencapai 10.000 Ha, dengan memiliki batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung Pasar Panjang
- Sebelah Barat : Kampung Muara Batu Batu/Runding
- Sebelah Selatan : Kampung Badar / Teladan Baru Lae Pemualen
- Sebelah Timur : Makmur Jaya / Pasir Panjang

Dengan jumlah penduduk Kampung Mukti Makmur sebanyak 1.345 jiwa. Kampung Mukti Makmur merupakan salah satu kampung dari 17 (Tujuh belas) kampung yang ada di kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Kampung Mukti Makmur terletak di sebelah Barat Kecamatan Simpang Kiri yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama  $\pm$  15 menit.

Kondisi fisik dasar kampung Mukti Makmur dapat dilihat dari segi pemanfaatannya lahan seluas 10.000 Ha. Dengan rincian pembagian lahan sebagai berikut :

- Perumahan/Pemukiman : 72 ha
- Perkebunan : 900 ha
- Dan Lainnya : 28 ha

#### **a. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2015 jumlah penduduk Kampung Makmur Makmur terdiri dari 1.345 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Tiap Dusun**

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Keterangan
		L	P	JMLH	
1	Sumber Ringin	292	285	577	
2	Sumber Asri	191	180	371	
3	Sumber Jaya	200	197	397	
	Jumlah Total	683	662	1.345	

Sumber :RPJM Mukti Makmur

**b. Menurut Kelompok Umur**

**Tabel 3.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	68	66	134
5 - 9	75	70	145
10 - 14	70	61	131
15 - 19	52	59	111
20 - 24	46	62	108
25 - 29	62	54	116
30 - 34	56	61	117
35 - 39	51	53	104
40 - 44	46	36	82
45 - 49	35	32	67
50 - 54	25	32	57
55 - 59	31	25	56
60 - 64	30	24	54
65 - 69	18	13	31
> 70	18	14	32
<b>Jumlah</b>	<b>683</b>	<b>662</b>	<b>1345</b>

Sumber :RPJM Mukti Makmur

### c. Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.3 Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1 Orang
2	D 4 / Strata 1	20 Orang
3	D 3 / Sarjan Muda	4Orang
4	D 1 / D 2	2Orang
5	SLTA Sederajat	254 Orang
6	SLTP Sederajat	345 Orang
7	SD Sederajat	310 Orang
8	Tidak Sekolah	409 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.345 Orang</b>

*Sumber : RPJM Mukti Makmur*

## 2. Visi dan Misi Kampung Mukti Makmur

### a. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kota Subulussalam saat ini, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun ,juga dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Subulussalam maka dirumuskan visi pembangunan daerah pada Kampung Mukti Makmur adalah ” **Terwujudnya pembangunan didesa yang berkualitassejahtera dan berkeadilan, memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk pengembangan didesa dan terpenuhinya kehidupan masyarakat yang layak dan memadai dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, Penjelasan visi tersebut adalah perwujudan keadaan masyarakat yang maju, berkualitas dan tercukupi kebutuhan lahirah dan batiniah yang didukung dengan keadaan**

lingkungan yang aman dan damai serta bermartabat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.

Hal tersebut sesuai dengan kata kunci yang tertera dalam visi Rencana Pembangunan Desa Mukti Makmur, yaitu:

**a) Berkualitas dan Berkeadilan**

Membangun manusia yang berkualitas dan transparansi yang jujur amanah, maju, unggul dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan meningkatkan pelayanan dalam masyarakat terutama kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi serta meningkatkan taraf masyarakat Kota Subulussalam.

**b) Sejahtera**

Merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Kota Subulussalam.

**c) Aman dan Bersih**

Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar dan gangguan dari dalam. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan dan rukun dalam sistem negara hukum. Sasaran utama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari

menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan serta penyelundupan lintas batas.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kota Subulussalam yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita - cita masa depan.

#### **b. Misi**

Untuk memenuhi visi tersebut Pemerintah Kota Subulussalam menjabarkannya kedalam misi Kampung Mukti Makmur :

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai
2. mewujudkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada
3. terpenuhinya kehidupan masyarakat yang layak dan seimbang
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih,
5. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung usaha warga miskin di bidang pertanian dan bidang lainnya,
6. Peningkatan pelayanan informasi dan teknologi tepat guna bidang pertanian maupun di bidang lainnya Membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap,

perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal.

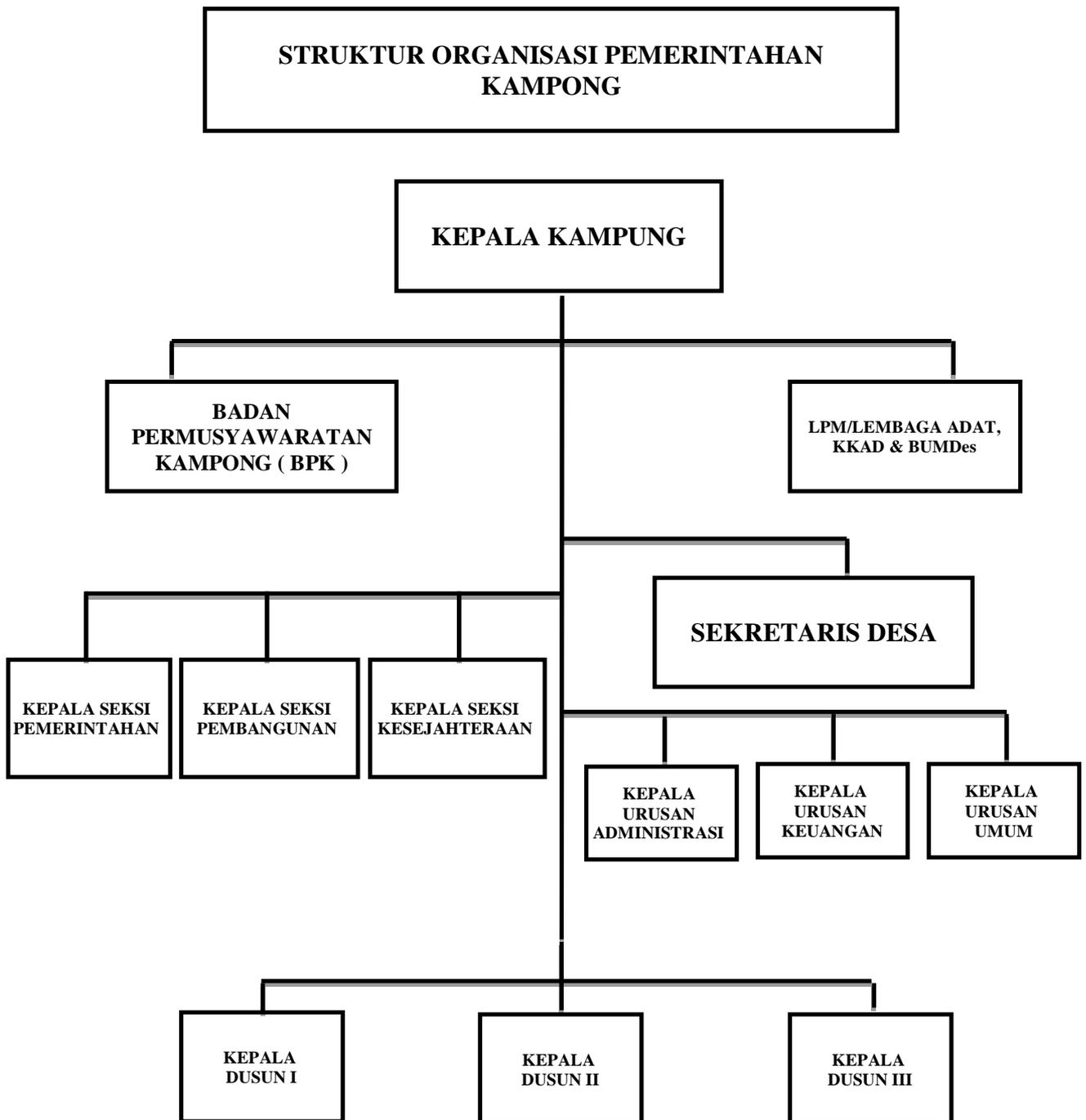
7. Membangun transformasi menuju masyarakat madani yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat maupun mitra swasta lainnya.
8. Meningkatkan Pola hidup Bersih dan Sehat
9. Mendorong keswadayaan warga dalam pembangunan dan kerjasama dengan berbagai lembaga.
10. Membuka akses dan peluang yang sama dan setara antara kaum laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya.
11. Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan setara dalam keikutsertaan atau partisipasi dalam pembangunan,
12. Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kewenangan yang adil dan setara dalam peran pengambilan keputusan.
13. Membantu agar kaum laki-laki dan perempuan dapat merasakan manfaat yang sama dan setara terhadap hasil-hasil pembangunan
14. Mendorong pertumbuhan usaha warga miskin dan menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, baik yang berbasis program maupun dengan kemitraan dengan lembaga atau instansi lainnya,
15. Meningkatkan kesehatan ibu hamil,
16. Meningkatkan kesehatan balita,

17. Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau bagi warga miskin, Memberikan kesempatan sekolah seluas-luasnya bagi anak usia sekolah,
18. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung usaha warga miskin di bidang pertanian dan bidang lainnya,
19. Peningkatan pelayanan informasi dan teknologi tepat guna bidang pertanian maupun di bidang lainnya.
20. Optimalisasi kelembagaan Kampung.

### **3. Struktur Pemerintahan Kampung**

Kampung Mukti Makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan Kampung dengan pola minimal, selengkapnya sbb:

Gambar 3.2 Bagan Pemerintahan Kampung Mukti Makmur



**Tabel 3.4 Daftar Perangkat Kampong Kampong Mukti Makmur**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	GUNAWAN	Kepala Kampong Mukti Makmur	
2.	NURJAMAN	Sekretaris Kampong	
3.	UJANG TEGUH HARIANTO	Kepala Kaur Pemerintahan	
4.	SUDAR MAWAN	Kepala Kaur Pembangunan	
5.	JULI EFENDI	Kepala Kaur Umum	
6.	PARTI RAHAYU	Kepala Kaur Keuangan	
7.	SUTIONO	Kepala Dusun I	
8.	SUPOMO	Kepala Dusun II	
9.	YATIMIN	Kepala Dusun III	

*Sumber : RPJM Mukti Makmur*

**Tabel 3.5 Daftar anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK)**

**Kampong Mukti Makmur**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	RUSLAN HALAWA	Ketua	
2.	MUHARIYONO	Wakil Ketua	
3.	SRIDARNIATI	Sekretaris	
4.	NURHOLIK	Anggota	
5.	MAMAT RAHMAT	Anggota	
6.	WINARSEH	Anggota	
7.	GUNAWAN	Anggota	

*Sumber : RPJM Mukti Makmur*

**Tabel 3.6 Rekap Struktur Pemerintahan Kampong Mukti Makmur**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1	GUNAWAN	Kepala Kampong Mukti Makmur	
2	NURJAMAN	Sekretaris Kampong	
3	UJANG TEGUH HARIANTO	Kepala Urusan Pemerintahan	
4	SUDAR MAWAN	Kepala Urusan Pembangunan	
5	JULI EFENDI	Kepala Urusan Umum	
6	PARTI RAHAYU	Kepala Urusan Keuangan	
7	SUTIONO	Kepala Dusun Sumber Ringin	
8	SUPOMO	Kepala Dusun Sumber Asri	
9	YATIMIN	Kepala Dusun Sumber Jaya	
10	WIDIA NINGSIH	Ketua PKK	
11	RUSLAN HALAWA	Ketua BPK	

*Sumber : RPJM Mukti Makmur*

**Tabel 3.7 Rekap Struktur Pemerintahan Kampong Mukti Makmur****Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1	Suwarno Np	Tokoh Masyarakat	
2	Sunarti	Tokoh Perempuan	
3	Kartawan	Ketua RT 01 .	

No	Nama	Jabatan	Ket
4	Adinen	Ketua RT 02	
5	Supandi	Ketua RT 03	
6	Riswandi	Ketua RT 04	
7	Khairudin	Ketua RT 05	
8	Budiono	Ketua RT 06	
9	Adi suryadi	Ketua RT 07	
10	Nurul Amin	Ketua RT 08	
11	Iskandar	Ketua RT 09	
12	Nurodin	Ketua RT 10	
13	Pujianto	Ketua RT 11	

*Sumber : RPJM Mukti Makmur*

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa**

##### **a. Kepala Desa**

- 1) Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- 3) Menetapkan peraturan – peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan bersama masyarakat Desa.

- 6) Membina ekonomi desa.
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.
- 8) Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peaturan – peraturan perundang - undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**b. Sekretaris Desa**

- 1) Tugas Pokok : membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Fungsi :
  - a) Peyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
  - b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalagan.
  - c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
  - d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
  - e) Penyiapan bahan Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - f) Mengkoordinasian Penyelenggaraan tugas – tugas urusan.
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**c. Kepala Urusan (KAUR) Umum**

- 1) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- 2) Fungsi :
  - a) Pelaksanaan pengadilan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengadilan tata kearsipan.
  - b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
  - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
  - d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
  - e) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
  - f) Persiapan bahan – bahan laporan.
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

**d. KAUR Keuangan**

- 1) Tugas Pokok : Memebantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan APB Desa.
- 2) Fungsi :
  - a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
  - b) Perispan bahan penyusunan administrasi Desa.
  - c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

**e. KAUR Pemerintahan**

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- 2) Fungsi :
  - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
  - b) Persiapan bahan – bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
  - c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
  - d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa.
  - e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil
  - g) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 3) Administrasi Pemerintahan Desa
  - a) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b) Pembuatan Kartu Keluarga (KK).
  - c) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi susah agar mendapatkan

penanggulangan penanguhan. Misalkan penanguhan atau pengurangan beban biaya dirumah sakit. Pembuatan surat ni tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi kartu Multiguna, kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.

- d) Surat Keterangan Lalu Lintas.
- e) Surat Keterangan NTCR.
- f) Surat Keterangan Pernikahan.
- g) Surat Keterangan Naik Haji.
- h) Surat Keterangan Domisili.
- i) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian.
- j) Surat Keterangan Pindah.
- k) Surat Keterangan Lahir/Mati
- l) Surat Keterangan Ke Bank, dll.
- m) Surat Keterangan Pengiriman Wesek.
- n) Surat Keterangan Jual Beli Hewan.
- o) Surat Keterangan Izin Keramaian.
- p) Pengenaan pemungutan atas Transaksi Jual Beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- q) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.

- r) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
- s) Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes.
- t) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

**f. KAUR Ekonomi Pembangunan**

- 1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam kebijakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- 2) Fungsi :
  - a) Penyiapan bantuan – bantuan analisa dan kajian perkebangnan ekonomi masyarakat.
  - b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
  - c) Pengelolaan tugas pembantuan.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**g. KAUR Kesra ( Kesejahteraan Rakyat)**

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan dan sosial kemasyarakatan.
- 2) Fungsi :
  - a) Penyiapan bahan untuk melaksanakan perogram kegiatan keagamaan.

- b) Perkebangan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### **h. Kepala Dusun (KADUS)**

##### 1) Tugas :

- a) Membantu melaksanakan tugas kepala dalam wilayah kerjanya.
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan pengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

##### 2) Fungsi :

- a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- b) Melakukan tugas dibidang pemabngunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyrakat dan melakukan pembinaan perekonomian.

- d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e) Melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

**i. BPD (Badan Perwakilan Desa)**

1) Tugas :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Melaksanakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c) Mengusulakan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d) Membentuk manampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e) Menyusun tata tertib BPD.

2) Hak :

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b) Menyatakan pendapat Kewajiban.
- c) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- f) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

- g) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentinga pribadi, kelompok, dan golongan.
- h) Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- i) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat di tarik suatu kesimpulan.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa key informan di kampung Mukti Makmur kota Subulussalam, dan kantor koordinator kota Subulussalam. Maka selanjutnya jug diperlukan data sekunder dalam membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber seperti data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari kantor kepala kampung Mukti Makmur kota Subulussalam.

Data-data yang diperoleh tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di kantor kepala kampung Kota Subulussalam dapat terjawab dan di analisa. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistatis sesuai dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

## **A. Deskripsi Hasil Wawancara**

### **1. Pencapaian Tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB dengan bapak Agusep S. Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU Kota Subulussalam mengatakan bahwa hasil dari penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang telah dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) masih belum efektif. Hal itu dikarenakan lambatnya proses pelaksanaan program-program dari RPLP itu sendiri. Hal ini karena kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodir karena harus ditentukan melalui skala prioritas dan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, serta lambatnya dana yang masuk ke rekening desa dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Namun jika dikatakan gagal juga tidak, karena program-program yang ada dalam RPLP juga masih berjalan sampai sekarang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14:45 WIB dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sangat berperan penting dalam proses penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Data-data baseline dari masing-masing dusun yang telah disusun dalam dokumen RPLP oleh TIPP. Rumusan perencanaan yang dilakukan TIPP 90% sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 10% masalah timbul setelah pelaksanaan program. Sedangkan mengenai jadwal pelaksanaannya masih sering mengalami keterlambatan dikarenakan lambatnya anggaran yang masuk ke

rekening desa dan rekening BKM. Hal ini membuat pelaksanaan program menjadi kurang efektif.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 pada pukul 11:00 WIB dengan Bapak Teguh Widodo selaku perwakilan tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang bertujuan sebagai acuan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan masih memiliki banyak kendala yang membuat pelaksanaan program tersebut berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program RPLP tersebut. Sehingga pencapaian tujuan penyusunan RPLP dan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal.

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 14:30 dengan Ibu Dedeh Kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) sebagai pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan permukiman yang di susun Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) belum 100% tepat sasaran dan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya penentuan skala prioritas dari semua masalah-maslah yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan program juga selalu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan BKM sering terlambat. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi

kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Hal-hal tersebut yang membuat pencapaian tujuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program tidak efektif.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yaitu sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang di jadikan sebagai acuan/pedoman dan alat control/pengawasan dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan masih belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPLP, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa, dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

## **2. Integrasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018 pada pukul 10:00 WIB dengan Bapak Agusep S.Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU kota subulussalam mengatakan bahwa tentang pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan lingkungan Permukiman (RPLP), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif karena pelaksanaan rapat selalu diberitahukan melalui undangan resmi yang dikeluarkan kepala desa. Namun kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten membuat rapat penyusunan RPLP tidak terintegritas dengan baik. Sedangkan prosedur pelaksanaan rapat tentunya dihadiri oleh kepala desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perwakilan masyarakat, dan tim fasilitator untuk membahas

RPLP dan yang disesuaikan dengan RPJMDes. Dalam hal ini dilakukan sinkronisasi kegiatan/usulan-usulan perencanaan untuk melihat apa yang menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan disesuaikan oleh kemampuan anggaran yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14:45 WIB dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa tentang rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan permukiman (RPLP) pihak Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunitif dalam menginformasikannya. Karena TIPP tetap berkoordinasi dengan kepala kampung dan BKM penyusun rencana rapat sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan program. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP menyebabkan keputusan rapat tidak terintegritas dengan baik dan cenderung hanya berdasarkan pengamatan TIPP saja. Sedangkan prosedur penyusunan RPLP, TIPP menghimpun baseline dari musyawarah tingkat dusun untuk dibawa ke rapat tingkat desa guna untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan dana/anggaran yang ada. Rapat ini juga untuk menyesuaikan dengan data RPJMDes.

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 dengan bapak Teguh Widodo selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif dalam menginformasikan kegiatan rapat maupun hasil rapat, karena dalam pelaksanaan penyusunan sangat dibutuhkan partisipasi kepala kampung, BKM, dan

masyarakat. Namun demikian dalam rapat penyusunan RPLP juga masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat sehingga hasil keputusan rapat tidak terintegritas dengan baik, dan hanya berdasarkan pendapat-pendapat dari TIPP dan pihak terkait lainnya. Sedangkan prosedur penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dilaksanakan dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait untuk menentukan kegiatan dengan menyesuaikan hasil penyusunan RPLP dengan RPJMDes.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 14:30 dengan ibu Dedeh kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mengatakan bahwa sejauh ini Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) cukup aktif dan komunikatif memberikan informasi pelaksanaan kegiatan rapat, karena secara administratif diundang melalui surat yang dikeluarkan kepala desa. Namun kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP menyebabkan tidak adanya penyeragaman dan penyatuan Pendapat dalam pengambilan keputusan. Hal ini lah yang menyebabkan rapat penyusuna RPLP tidak terintegritas dengan baik. Mengenai prosedur penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), TIPP melakukan pendampingan dalam musyawarah di tingkat dusun yang kemudian hasilnya di bawa pada rapat penyusunan RPLP di tingkat desa yang di hadiri oleh BKM, kepala desa, dan perwakilan masyarakat. Dalam hal ini dilakukan pemilihan kegiatan/usulan-usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui skala prioritas. Kegiatan/usulan-usulan yang ada dalam RPLP harus mengacu pada RPJMDes.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) masih tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pihak-pihak yang berkompeten yang hadir dalam rapat tersebut.

### **3. Adaptasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018 pada pukul 10:00 dengan bapak Agusep S.Hut selaku Asisten IC kantor KOTAKU mengatakan bahwa perlunya sosialisasi oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai bentuk adaptasi kepada lingkungan dan masyarakat desa. Hal ini diperlukan agar masyarakat lebih memahami tentang RPLP tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rapat penyusunan dan pelaksanaan program RPLP tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14:45 WIB dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa perlunya adaptasi terhadap masyarakat akan membuat pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan karena dalam penyusunan dan pelaksanaan program RPLP sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan penyusunan RPLP dan berjalan dengan baik. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat

kurang berpartisipasi dalam penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Sehingga penyusunan RPLP menjadi tidak efektif.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11:00 WIB dengan bapak Teguh Widodo selaku perwakilan tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan rapat penyusunan Rencana penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kurangnya sumber daya manusia membuat hasil rapat penyusunan RPLP masih kurang akurat. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya adaptasi dan komunikasi yang tidak baik antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat setempat.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 14:30 dengan ibu Dedeh Kurnia S.Pd selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kampung Mukti Makmur mengatakan bahwa kurangnya adaptasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) kepada masyarakat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang bersifat final tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa pentingnya adaptasi antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan juga dalam pelaksanaan program. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi

masyarakat juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sehingga tujuan dari penyusunan dan pelaksanaan program dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan dari jawaban para narasumber bahwa dalam pelaksanaan dan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang ada dikampung Mukti Makmur, kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat mengenai RPLP itu sendiri dan lambatnya dana/anggaran yang masuk rekening desa dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kurangnya integrasi dalam rapat penyusunan RPLP dan adaptasi terhadap masyarakat juga menyebabkan penyusunan RPLP tidak efektif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tercapainya Tujuan**

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan seperti yang dikemukakan Steers dalam Prihatmanti (2013:2). Berdasarkan pengertian efektivitas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai.

Hal tersebut juga di perkuat dengan teori Steers dalam prihatmanti (2013:2) yang membagi ukuran efektivitas menjadi 3 yaitu, adanya tujuan, integrasi, dan adanya adaptasi. Agar tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa

indikator yaitu kurun waktu, dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Berdasarkan teori tersebut penulis dapat menilai bahwa pencapaian tujuan dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) masih belum efektif, karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan proram RPLP tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk tidak meninggalkan kegiatan mereka. Hal ini Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai RPLP tersebut. Dalam hal ini karena tidak adanya sosialisasi baik dari TIPP maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai RPLP tersebut. Sehingga masyarakat tidak paham akan tugas dan dan fungsi TIPP dan tujuan dari RPLP tersebut.

Kemudian lambatnya dana yang masuk ke rekening desa dan rekening BKM juga membuat pelaksanaan program RPLP tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan. Jika pelaksanaan program banyak mengalami keterlambatan, maka program-program yang telah di tentukan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan tidak dapat terlaksana secara keseluruhan. Karena waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan program tidak mencukupi dan akan masuk kedalam perencanaan untuk tahun berikutnya. Dan program-program yang tidak terlaksana dalam tahun berjalan akan diajukan untuk program tahun berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan dalam penyusuna RPLP dan pelaksanaannya masih kurang efektif.

Hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 dengan bapak Agusep S.Hut mengatakan bahwa hasil penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang telah dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) masih belum efektif. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tidak dapat di akomodir karena harus di tentukan melalui skala prioritas dan harus disesuaikan dengan dana/anggaran yang ada. Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga membuat lambatnya proses pelaksanaan program-program dari RPLP itu sendiri.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 dengan bapak Teguh Widodo yang mengatakan dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang dijadikan sebagai acuan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan masih memiliki banyak kendala yang membuat pelaksanaan program tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program RPLP tersebut. Sehingga pencapaian tujuan penyusunan dan pelaksanaan program tersebut menjadi kurang maksimal.

## **2. Integrasi**

Integrasi merupakan aspek penyeragaman maupun penyatuan dalam suatu sistem. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi. Steers dalam Prihatmanti (2013:2).

Berdasarkan teori diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam mengintegrasikan hasil pelaksanaan rapat perencanaan penyusunan RPLP melalui prosedur yang baik, yaitu di hadiri oleh pihak-pihak terkait dan adanya partisipasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan penyusunan RPLP dan pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, terstruktur, dan terintegrasi dengan baik.

Namun berdasarkan hasil pengamatan yang ditemukan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan di kampung Mukti Makmur, penulis menemukan bahwa komunikasi yang dilakukannTim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dengan pihak-pihak terkait sudah cukup baik, karena TIPP sendiri harus selalu berkerja sama baik dalam rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) maupun dalam pengawasan pelaksanaan program. Namuntidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh TIPP kepada masyarakat mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai TIPP dan RPLP tersebut. Hal tersebut juga akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPLP dan pelaksanaan program-program tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kampung Mukti Makmur juga menyebabkan rapat penyusunan RPLP yang dihadiri oleh beberapa masyarakat kurang berkompeten. Masyarakat kurang berkompeten dalam memberikan pendapat dan masukan dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP. Sehingga keputusan-keputusan hasil

rapat hanya di dasarkan pada data-data yang dikumpulkan oleh TIPP. Hal itu menyebabkan hasil pelaksanaan penyusunan RPLP tidak terintergrasi dengan baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agusep S.Hut pada tanggal 5 Februari 2018 yang mengatakan bahwa tentang pelaksanaan rapat penyusunan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif. Namun dalam rapat penyusunan RPLP kurangnya sumberdaya manusia yang kurang berkompeten yang hadir dalam rapat penyusunan RPLP. Menyebabkan rapat penyusunan RPLP tidak terintegrasi dengan baik.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 dengan bapak Gunawan selaku kepala kampung Mukti Makmur yang mengatakan bahwa Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sudah cukup komunikatif dalam menginformasikan mengenai rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP membuat keputusan rapat tidak terintegrasi dengan baik, Karena hasil keputusan rapat cenderung hanya berdasarkan pegamatan dari TIPP.

### **3. Adanya Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. (Steers dalam Prihatmanti (2013:2) Dalam hal ini yaitu peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dengan pihak-pihak terkait lainnya terutama dengan masyarakat.

Berdasarkan teori diatas penulis dapat menilai bahwa dalam hal ini adaptasi merupakan kemampuan TIPP dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) itu sendiri. Serta menjalin komunikasi yang baik antara TIPP dan Pihak-pihak terkait lainnya dengan masyarakat sehingga tujuan dari penyusunan RPLP dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Namun di kampung Mukti Makmur kurangnya adaptasi yang dilakukan antara Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan pihak-pihak terkait lainnya dengan masyarakat dalam melaksanakan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) membuat pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut menjadi kurang maksimal. Kurangnya pendekatan yang dilakukan TIPP dengan masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui siapa saja anggota dari TIPP tersebut. Kurangnya adaptasi dan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik juga menyebabkan TIPP tidak mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembangunan di desanya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena seharusnya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan didesanya sendiri. Adaptasi yang kurang baik tersebut menyebabkan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan penyusunan RPLP dan pelaksanaan program menjadi tidak efektif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 dengan ibu Dedeh Kurnia selaku ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kampung Mukti Makmur yang mengatakan

bahwa kurangnya adaptasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) kepada masyarakat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang bersifat final, tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam masih belum efektif. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan jadwal yang di tentukan. Kurangnya sosialisasi serta komunikasi yang kurang baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat membuat yang membuat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai TIPP dan RPLP tersebut. Bahkan banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa didesanya ada relawan yang peduli dengan pembangunan didesanya yang tergabung dalam TIPP. Hal tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam rapat penyusunan RPLP maupun dalam pelaksanaan program RPLP tersebut.

Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat penyusunan RPLP serta kurangnya partisipasi masyarakat yang hadir dalam rapat penyusunan juga menyebabkan hasil dari rapat menjadi kurang efektif, dan tidak terintegrasi dengan baik. Karena hasil rapat hanya didasarkan oleh beberapa

pendapat dari peserta yang hadir dalam rapat, sedangkan masyarakat sendiri tidak berkompeten dalam memberikan pendapat/masukan.

Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program, dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subjek pembangunan tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam maka dapat dilihat bahwa hasil penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di kampung Mukti Makmur masih belum efektif. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Mukti Makmur sehingga harus dilakukan penentuan skala prioritas yang menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodir. Kemudian pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui penyusunan RPLP juga belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam rapat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP membuat dokumen RPLP yang dihasilkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan ke rekening BKM juga menyebabkan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP dan pelaksanaan program, dalam hal ini sangat dibutuhkan

partisipasi masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subjek pembangunan tersebut.

Banyaknya kendala-kendala yang seperti yang dijelaskan diatas menyebabkan fungsi TIPP dalam menyusun RPLP sebagai acuan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan tidak efektif.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta masyarakat dalam pelaksanaan rapat penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Sehingga kedepannya hasil rapat penyusunan RPLP menjadi lebih maksimal.
2. Perlunya pelatihan-pelatihan dari fasilitator kepada TIPP guna meningkatkan sumber daya manusia dalam TIPP. Sehingga TIPP sendiri dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Terkait dengan keterbatasan anggaran, TIPP harus mampu menyikapi permasalahan dengan menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang lebih komperhensif dengan memanfaatkan anggaran secara optimal, efisien dan efektif.
4. Mengenai kurangnya partisipasi masyarakat, TIPP harus melakukan sosialisasi-sosialisasi sehingga masyarakat lebih memahami tentang TIPP dan RPLP sendiri. Karena dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

5. Sebaiknya TIPP harus beradaptasi dan meningkatkan komunikasi dengan lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat penyusunan RPLP sehingga hasil rapat akan terintegrasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Koestoer, Raldi H. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Teori dan Kasus*. Jakarta: UI-Pres
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurkholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sutrisno, edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Surabaya: Kencana Prenamedia Group
- Tarigan, Robinson, M.R.P., Prof. Drs. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Usman, Husnaini, Purnomo S.A. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widjaja. HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### Sumber Lain

[http://www.p2kp.org/pustaka/files/Ebook\\_JUKNIS\\_PLPBK\\_FEB2014.pdf](http://www.p2kp.org/pustaka/files/Ebook_JUKNIS_PLPBK_FEB2014.pdf)

Amri, Agus, Farida. 2011. *Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm. 1159-1167

Prihatmanti, Marina Ayu. 2013. *Efektivitas Kesejahteraan Sosial Anak Balita(PKSAB) di TAS. DR. Soetomo Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol 1, no1, hlm.1-2

Wini, Ana. 2009, *Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kawasan Kumuh*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol 20 no. 2. Hlm. 146-149

[http://www.p2kp.org/pustaka/files/Ebook\\_JUKNIS\\_PLPBK\\_FEB2014.pdf](http://www.p2kp.org/pustaka/files/Ebook_JUKNIS_PLPBK_FEB2014.pdf)

[http://kotaku.pu.go.id/pustaka/files/Petunjuk\\_teknis\\_2012/Petunjuk Teknis RPL P.pdf](http://kotaku.pu.go.id/pustaka/files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_RPL_P.pdf)

- **Dokumen RPLP Kampung Mukti Makmur**
- **Dokumen RPJM Kampung Mukti Makmur**
- **Modul TIPP Kota Tanpa Kumuh Kota Subulussalam**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **ROFIK INDRA LESMANA**

Tempat/TanggalLahir : Mukti Makmur / 21 September 1996

JenisKelamin : Laki--laki

Agama/Kewarganegaraan : Islam/Indonesia

Alamat : Jl.Beringin IV. No. 175 Helvetia, Medan Helvetia,  
Medan

AnakKe : 2

Nama Orang Tua :

Ayah : SUJIONO

Ibu : SUTI'AH

Alamat : Jl. Seroja. No.300, Mukti Makmur, Simpang Kiri,  
Kota Subulussalam

### **Riwayat Pendidikan**

- 1.Tamat SD Negeri 2 Bakal Buah Kota Subulussalam, Tahun 2008, berijazah
- 2.Tamat SMP Negeri 2 Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tahun 2011, berijazah
- 3.Tamat SMA Negeri 1 SimpangKiri Kota Subulussalam, Tahun 2014, berijazah
- 4.Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 sampai sekarang.

Demikian isi daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

**Rofik Indra Lesmana**

## **Pedoman wawancara**

### **Judul: Efektivitas tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kantor Kepala Kampung Mukti Makmur Kota Subulussalam**

#### **A. Pencapaian tujuan**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah tugas dan fungsi dari TIPP dalam penyusunan RPLP?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang menjadi kendala dalam penyusunan RPLP? Jelaskan!
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil rumusan perencanaan yang di lakukan TIPP sudah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat? Jelaskan!
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh ini apakah hasil perencanaan yang dilakukan TIPP sudah sesuai dengan jadwal yang di tentukan dan sudah dengan sasaran yang ada? Jelaskan!

#### **B. Integrasi**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah peran masyarakat, kepala kampung dan BKM dalam penyusunan RPLP?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah koordinasi antara TIPP dengan BKM dan kepala kampung, serta masyarakat dalam proses penyusunan RPLP?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah prosedur penyusunan RPLP?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah TIPP cukup komunikatif dalam memberikan informasi mengenai penyusunan RPLP? Jelaskan!

### C. Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah sarana dan prasarana pada penyusunan RPLP? Apakah sudah memadai?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pada rapat penyusunan RPLP sudah di hadiri oleh pihak-pihak terkait yang berkompeten?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide-ide dalam penyusunan RPLP?